



ISSN: 1858-2664

September 2005, Vol. 1, No.1

# JURNAL PENYULUHAN

## RESENSI BUKU



### MEMBANGUN KELEMBAGAAN PERTANIAN YANG TANGGUH BERDASARKAN NILAI-NILAI TRADISIONAL

Judul Buku : Revitalisasi Subak dalam Memasuki Era Globalisasi  
 Editor : I Gde Pitana dan I Gede Setiawan AP.  
 Penerbit : Andi Yogyakarta  
 Ukuran : 23 Cm x 16 Cm  
 Tebal : xix + 293 halaman

Masalah kelestarian/keberlanjutan subak dan pertanian Bali dalam konteks perubahan situasi global yang sangat struktural, merupakan *main issue* dalam kumpulan tulisan ini. Berbagai tulisan yang terhimpun, langsung ataupun tidak langsung, membahas kaitan antara subak, sebagai lembaga tradisional di Bali, dengan isu globalisasi yang semakin pesat lewat sistem perdagangan bebas yang dikembangkan oleh WTO. Subak, sebagai lembaga sosial-religius yang lebih banyak berorientasi *centrifugal*, mau tidak mau harus berhadapan dengan situasi global dengan kekuatan *cengtripetal* yang dahsyat.

Buku ini diawali dengan tulisan Nyoman Sutawan, yang mendiskusikan 'kegelisahannya' di dalam melihat eksistensi subak ke depan. Dengan menekankan fungsi-jamak (*multifunctional roles*) dari subak, Sutawan menekankan bahwa menjaga kelestarian subak merupakan suatu keharusan di dalam pembangunan Bali. Kelestarian/keberlanjutan dalam pandangan Sutawan harus dilihat secara *holistic*, yang mencakup kelestarian kelembagaan subak (*institutional sustainability*), jaringan irigasi (*technical*

*sustainability*), produksi pangan (*economic sustainability*), ekosistem lahan sawah (*ecological sustainability*), tradisi dan ritual keagamaan terkait dengan budaya padi (*socio-cultural sustainability*), dan lingkungan alami lokal yang merupakan faktor eksternal subak tetapi berdampak langsung dan nyata kepada kelestarian kelima komponen dari sistem subak tersebut (*environmental sustainability*).

Selanjutnya Suprodjo Pusposutardjo membahas tentang konsep 'keadilan' dalam sistem irigasi subak, yang sangat strategis di dalam pengembangan subak ke depan. Konsep keadilan yang ditekankan adalah keadilan sosial, yang meliputi keadilan prosedural, keadilan pengagihan, dan keadilan korektif.

Dalam usaha menjaga keberlanjutan atau kelestarian subak secara dinamis, subak harus melakukan transformasi atau rekonstruksi, tetapi tetap dengan nilai-nilai dasar yang telah dimiliki. Sebagai suatu 'sistem', subak memiliki komponen *ideofact*, *sociofact*, dan *artifact*. Semua komponen ini dapat direkonstruksi dan ditransformasi agar sesuai dengan perkembangan eksternal di dunia global. Hal ini dibahas secara

komprehensif dalam tulisan yang dikontribusi oleh Wayan Windia.

Berbagai nilai yang ada pada subakembali mendapat pembahasan dari Wayan Sudarta, yang mengaitkan berbagai nilai tersebut dengan perkembangan inovasi kekinian. Sudarta sampai pada kesimpulan bahwa berbagai nilai tradisional yang ditemukan pada subak sesungguhnya sangat relevan dengan berbagai isu pertanian dewasa ini, terutama terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Diskusi mengenai nilai tradisional ini dapat juga dilihat secara empiris dalam praktek '*ngaben bikul*', sebagaimana diuraikan oleh Wayan Arga. Kalau ditarik lebih ke atas, ternyata nilai-nilai tradisional subak sudah sesuai dengan berbagai wacana yang didapatkan dalam Kitab Suci Weda, sebagaimana dibahas oleh Wayan Widyantara.

Meskipun secara tradisional subak merupakan lembaga sosial-religius, sesungguhnya subak mempunyai potensi yang besar di dalam mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi. Hal ini secara gamblang dibahas oleh Ketut Suamba dan Wayan Budiasa. Berbagai sifat dan kekuatan internal yang ada pada subak merupakan kekuatan tersendiri untuk bergerak dalam aktivitas ekonomi. Namun hambatan dan tantangan untuk menjadikan subak menjadi lembaga ekonomi juga masih banyak, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Gede Sedana melihat bahwa tantangan pertanian ke depan menuntut adanya berbagai usaha pemberdayaan terhadap petani anggota subak, yang harus dilakukan dengan pendekatan partisipatif. Pemberdayaan subak diharapkan mampu menimbulkan sikap petani yang semakin loyal terhadap profesinya, bangga dan merasa lebih "bergengsi", bersukaria dalam menerima hasil usahatani, mandiri dalam pengambilan keputusan, dan memiliki wawasan ekonomis/agribisnis. Pemberdayaan ini merupakan prasyarat dalam usaha pelestarian

subak. Dengan melihat kasus pendirian sebuah subak baru, sebagaimana ditulis oleh Made Sarjana, sesungguhnya kekhawatiran akan sirnanya sistem subak di Bali dapat sedikit terobati. Kasus Subak Giri Mertha (Mengani) yang berdiri tahun 1990-an secara jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakat pedesaan cukup berdaya mengembangkan wilayahnya, dengan pengembangan secara swadaya. Yang diperlukan dari pemerintah adalah fasilitasi, dukungan moral, dukungan politis, dan dukungan kebijakan yang memperkuat keberdayaan masyarakat desa atau subak. Secara lebih teoretis, konsep pemberdayaan yang dikaitkan dengan subak ini dibahas secara detail oleh Gde Suyatna, yang menyarankan agar ada perubahan paradigma dalam pembangunan, dengan menekankan partisipasi masyarakat lokal.

Meskipun perempuan Bali dikenal sebagai pekerja yang ulet dan mampu mengerjakan berbagai jenis pekerjaan, ternyata Wayan Sri Astiti mengemukakan bahwa ketimpangan gender masih ditemukan dalam aktivitas subak. Dikatakannya bahwa perempuan belum dilibatkan secara maksimal di dalam mengelola subak sebagai suatu lembaga, pada hal sesungguhnya perempuan mempunyai kemampuan untuk itu.

Dalam kaitan dengan APEC, AFTA, dan WTO yang akan segera diterapkan, Oka Suryawardani melihat bahwa era pasar bebas akan membawa keterhimpitan bagi subak dan petani. Pada saat ini (2004), pada saat pasar bebas belum terlaksana secara efektif, petani Bali sudah mengalami marginalisasi, apalagi kalau pasar bebas sudah berlaku efektif. Berbagai produk pertanian luar akan membanjiri Bali, dan konsumennya bukan saja golongan menengah ke atas, melainkan seluruh lapisan masyarakat. Yang menarik dari temuan Suryawardani adalah bahwa konsumsi berbagai produk impor oleh masyarakat Bali sangat terkait dengan prestise atau gengsi. Ditemukan bahwa

“Pemilihan buah-buahan impor di kalangan ibu-ibu di Bali antara lain disebabkan oleh gengsi, dalam arti bahwa mereka merasa lebih bergengsi apabila mengkonsumsi buah impor. Hal ini lebih menonjol lagi di dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang bersifat *exhibition* (‘pameran’), seperti untuk kebutuhan *gebogan* (karangan buah untuk upacara adat-keagamaan), sajian untuk tamu dalam pesta adat-keagamaan, dan seterusnya.”

Dalam kumpulan tulisan ini juga dibahas pertalian antara subak/pertanian Bali dengan pariwisata, yang merupakan sektor penggerak ekonomi Bali sejak beberapa dasawarsa terakhir. Sebagaimana dikemukakan oleh Gde Pitana, pendekatan dikotomis di dalam melihat hubungan antara pertanian dengan pariwisata merupakan pendekatan yang tidak produktif. Sebaliknya, Pitana menyarankan agar kedua sektor dilihat dalam suatu hubungan yang saling mendukung dan saling membutuhkan, dengan interdependensi yang kuat. Dengan pendekatan ini, kemajuan pariwisata tidak akan menghancurkan pertanian, justru sebaliknya, akan memperkuat pertanian di masa depan.

Dengan melihat berbagai tantangan ke depan, Ambarawati mencoba menawarkan strategi, yang melihat bahwa subak dan pertanian adalah salah satu komponen dalam suatu sistem yang besar. Oleh karena itu, pembangunan subak dan pertanian tidak dapat dipandang sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan harus dilihat dalam keterkaitan dengan sektor-sektor pembangunan lainnya. Dengan melihat kondisi pertanian dewasa ini, Ambarawati menyarankan agar pemerintah semakin meningkatkan perhatiannya pada sektor primer ini, dengan dukungan pengembangan kondisi yang kondusif.

Dari semua tulisan yang terkumpul dalam buku ini, tersirat sebuah simpulan umum bahwa globalisasi dan/atau pasar bebas akan membuat petani yang sudah terjepit akan semakin terjepit, sehingga semakin kecil insentif masyarakat untuk memasuki sektor pertanian. Konsekuensinya, eksistensi subak

juga terancam. Kalau ini terjadi, maka tulang punggung penyangga kebudayaan Bali akan melemah. Melemahnya kebudayaan ini pada akhirnya akan mengancam pembangunan Bali secara keseluruhan, dimulai dari melemahnya pariwisata yang mengandalkan kebudayaan sebagai modal dasar.

Kekhawatiran akan semakin melemahnya petani dan subak di Bali sejalan juga dengan pendapat bahwa WTO akan menghasilkan neraca pembayaran yang positif kepada negara-negara maju, sementara tidak diragukan lagi negara-negara berkembang akan menjadi pecundang, baik secara kolektif maupun individual. Akan terjadi aliran *surplus value* ke luar yang semakin deras, sehingga pada kasus Bali, akan terjadi “pembangunan di Bali”, tetapi bukan “pembangunan untuk Bali”. WTO telah menempatkan dirinya sebagai sentral yang mengatur kehidupan dunia di masa mendatang. Kalau di dalam proses modernisasi pasca Perang Dunia II masyarakat Dunia Ketiga dipaksa dan ditekan untuk meniru dan mengikuti model pembangunanisme (*developmentalism*) yang didisain dan diarahkan oleh World Bank dan IMF, maka kini, mereka dipaksa dan ditekan untuk menjadi hamba-sahaya dan pengekor dari WTO.

Posisi Bali dalam menghadapi era perdagangan bebas-WTO tidak ubahnya seorang petinju kelas bulu yang harus berhadapan dengan seorang lawan dari kelas berat. Tanpa adanya kebijakan yang benar-benar membela petani dan pertanian serta lembaga subak, maka keberlanjutan dan kelestarian subak akan terancam. Terkait dengan hal itu, sebagaimana dikatakan oleh Sutawan, pemberdayaan subak hendaknya jangan hanya menjadi wacana semata.

“... sawah beserta organisasi subaknya harus dilestarikan dengan berbagai upaya yang lebih serius, bukan sekedar melalui seminar atau wacana saja, namun harus ditindaklanjuti dengan tindakan nyata oleh kita semua, khususnya oleh Pemerintah Daerah Bali dengan segenap jajarannya” (Setiawan A.P., Gd).